

Forum Freedom 31, 19 Desember 2005

**Tema: Dampak-dampak Desentralisasi**

**Nara sumber : Anies R. Baswedan**

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

**Hamid Basyaib (HB)**

Selamat pagi saudara, anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom kerjasama antara Freedom Institute dengan radio 68 H. Pagi ini tamu kita adalah Dr. Anies Baswedan dari The Indonesian Institute, beliau adalah direktur riset Di Lembaga Itu. Selamat pagi Nies...

**Anies Baswedan (AB)**

Selamat Pagi !

**HB**

Kita akan membicarakan soal dampak-dampak Desentralisasi, Anies Baswedan ini disertasinya mengenai hal-hal di seputar otonomi daerah dan desentralisasi, jadi kita tepat betul mengundang beliau untuk berbicara soal ini. Nah, saya akan membicarakan sedikit tentang definisi Desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu transfer kekuasaan dari satu pemerintahan pusat kepada otoritas-otoritas lain yang lebih tersebar yakni pemerintahan-pemerintahan di daerah. Sebuah pemerintah yang ter-desentralisasi adalah lawan dari pemerintah yang ter-sentralisasi. Nah, sekarang Nis, mengapa desentralisasi pemerintahan itu perlu dilakukan ? itu dulu dasarnya ya, gimana ?

**AB**

Desentralisasi itu berangkat dari satu premis bahwa ada sentralisme. itu harus jadi Desentralisasi yang tidak mulai dengan ada sentralisme yang kuat.

**HB**

Dalam kenyataan...

**AB**

Dalam kenyataannya, itu yang pertama, yang kedua ada dimensi territorial dalam definisi desentralisasi. Jadi, ketika wilayahnya sebesar singapura, itu tidak lagi relevan berbicara desentralisasi. Jadi, ada dimensi territorial yang sangat kuat disini. Di tempat yang *diverse* (tersebar) tempatnya . maka, desentralisasi menjadi relevan. lalu pertanyaan tadi (pertanyaan Hamid), mengapa Indonesia misalnya perlu desentralisasi ? atau di banyak negara butuh desentralisasi ? Pertama, desentralisasi itu terkait dengan kemampuan pemerintah memberikan *service* pada *public*, kapasitas pemerintah untuk memberikan *service* pada *public*, ketika *public* itu tersebar maka kemampuan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan *public* dan memberikan *service* secara baik itu jadi terbatas. Di Jakarta ini kalau ditanya apa kebutuhan *public* Wamena? Mungkin jawabannya berbeda dengan pemerintah di Wamena sendiri. Dan yang tahu persis kebutuhannya disana. disini dari jauh. karena itu desentralisasi itu adalah menterjemahkan otoritas

pemerintah untuk memberikan *public service*. Dengan dimensi territorial ada didalamnya. Itu satu aspeknya (*public service*). Yang kedua itu aspek *abs torsi* dari aspirasi public. Kemampuan pemerintah pusat untuk meng *abs stor* aspirasi *public* ini sangat terbatas .bukan karena pemerintahnya tidak mampu. tetapi karena jumlah masyarakatnya yang begitu besar. *Diverse* (penyebaran ) di berbagai tempat, maka kapasitas Negara di tingkat pusat untuk menarik semua aspirasi jadi terbatas. Nah, proses *abstorsi* aspirasi dan *delivery public service* . itu dilakukan di tingkat lokal, nah inilah yang disebut sebenarnya dengan desentralisasi tadi, jadi itu *keyword* nya disitu.

**HB**

Anda kelihatannya nadanya sepenuhnya positif, bahwa desentralisasi itu jelas lebih baik daripada sentralisasi (sebaliknya)

**AB**

Nggak juga, karena desentralisasi itu, kita harus melihat aspeknya. Apa yang bisa di-desentralisasi-kan dan apa yang tidak ? jadi, ini. Para pendukung desentralisasi biasanya *day hard* , mendukung betul-betul. sementara yang menentang, menentang total. Padahal, desentralisasi itu apa ? apa yang mau di-sentralisasi-kan ? kebijakan moneter ? jangan sekali-kali di-sentralisasi-kan. Pengalaman amerika latin sudah membuktikan kalau kebijakan moneter bisa dilakukan di tingkat local, maka akan terjadi berbagai macam krisis. Atau kebijakan luar negeri. Tetapi aspek-aspek pemerintahan yang menyangkut *service delivery*, atau *public service*. Dilakukan di tingkat local itu di banyak Negara terbukti lebih efisien daripada semuanya dirancang dan dijalankan oleh pemerintah di Jakarta.

**HB**

Anda bilang tadi bahwa desentralisasi itu juga penting dalam rangka menjaring aspirasi, mengakomodasi aspirasi rakyat. artinya bisa tidak di terjemahkan bahwa itu artinya desentralisasi itu dengan sendirinya lebih demokratis ?

**AB**

Umumnya begitu, tetapi desentralisasi tidak *equivalent* dengan demokratis dengan satu pengertian demokrasi, pemerintah itu bisa demokratis dan senralistis. bisa juga desentralistik tapi tidak demokratis. Contohnya Uni Soviet itu adalah sebuah system yang (ketika Uni Sovietnya, bukan Rusia sekarang) itu sistemnya desentralistik. Dalam artian operasi *service delivery* itu tetapi ini bukan sebuah demokrasi sama sekali.

**HB**

Waktu itu mereka negara-negara bagian ya ?

**AB**

Ada negara-negara bagian , meskipun partai waktu itu dominan. Hanya *service delivery*, otoritas semuanya ada di tingkat daerah.

**HB**

Atau sebaliknya, yang *decentralized*. *Centralized* tetapi demokratis.

**AB**

Misalnya Inggris zaman Thatcher, itu sebuah pemerintahan yang *centralized* tetapi demokratis, jadi memang tidak *equivalent*, tapi meskipun begitu, secara umum desentralisasi itu memang sering berjalan

*hand in hand* dengan demokratisasi. Mengapa ? karena *logic*-nya masuk akal. *Logic*-nya bisa itu, ketika ada transfer otoritas dari pusat ke daerah, otoritas ini biasanya mencakup tiga. Pertama otoritas politik, kedua otoritas fiskal, ketiga otoritas administrasi. Ini membuat arena politik local jadi punya gigi sehingga kalau disebut proses demokratisasi. Ada kemudian minat public untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. mengapa ? karena dia terlibat, itu ada efek langsungnya.

**HB**

Artinya partisipasi yang yang tidak perlu di dorong-dorong, dengan pidato...

**AB**

Karena ada peluang disitu, untuk berpartisipasi

**HB**

Artinya biasanya kepentingan orang ya...

**AB**

Ya, tentu dan sebenarnya politik tidak harus realistis, tidak ada orang masuk politik bebas kepentingan, sehingga hampir selalu ditemukan korelasi yang positif antara desentralisasi dengan partisipasi politik, karena itu tadi, mendadak ada peluang bagi public. Untuk terlibat dan hasilnya bisa dirasakan oleh mereka sendiri. Jadi, aktifis-aktifis di tingkat local itu ada ladang baru untuk mereka mengaktualisasikan kepentingannya. Ini satu contoh mengapa desentralisasi selalu dikaitkan dengan demokratisasi . tetapi demokratisasikan sebetulnya ada banyak komponen ya. ok, Dalam hal ini kita sebut tiga saja, pertama transparansi, kedua partisipasi , ketiga *responsifness*. Tiga komponen utama dalam demokrasi. Kalau kita mengukur demokrasi

**HB**

Apa saja itu, bisa diuraikan tidak ?

**AB**

Misalnya secara konseptual kita bisa membayangkan dengan ada otoritas baru di tingkat daerah. Maka ada peluang untuk berpartisipasi, maka partisipasi akan meningkat maka pemerintah daerah itu harus ...

**HB**

Harus transparan?

**AB**

Satu transparan, kedua *responsive* juga, jadi proses pengambilan keputusan menjadi sirkular disitu. Public berpartisipasi menyampaikan aspirasi lalu menjadi tekanan bagi pemerintah, muncul kebijakan, masuk lagi ke *public* kembali lagi ke pemerintah, proses ini menjadi sirkular di tingkat daerah. Jadi ada partisipasi, ada *responsifness* di sini pemerintah tertuntut mau tidak mau terresponsif, tiga ada transparansi. dan mengapa transparansi harus terjadi? yaitu konsekuensi logis dari public yang mempunyai kekuatan pasti menuntut agar dana pajak, dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu dikelola secara bertanggung jawab, untuk bisa klarifikasi tanggung jawab mereka harus mengetahui proses ini. Kira-kira secara konseptual seperti itu.

**HB**

Kira-kira kerangkanya seperti itu.

**AB**

Kira-kira kerangkanya seperti itu, pra-konseptualnya seperti itu. Prakteknya tentu ada perbedaan, ada penyimpangan,,tetapi teoritical seperti itu.

**HB**

Ada nuansa.. Umumnya sangat positif ya, anda lihat tidak aspek-aspek negatifnya. Seperti misalnya disuarakan oleh ..ya sebutlah tentara. Yang dari dulu selalu keberatan. Jelas mereka keberatan dengan istilah federalisme. Lalu jadi otonomi diperluas, dsb. Itu jadi permainan kata, tetapi tetap poinnya mereka adalah keberatan. Karena itu mulai dua tahunan yang lalu kampanye NKRI digencarkan. Negara kesatuan..jadi harus ditegaskan bahkan masuk ke UUD. Jelas itu merupakan reaksi atau respon yang khawatir dari kecenderungan desentralisasi yang dianggap bisa memecah belah bangsa, dsb. Kira-kira itu aspek negatifnya. Anda setuju tidak ?

**AB**

Bahwa desentralisasi menyebabkan perpecahan, itu barangkali minimum kasusnya, desentralisasi itu sendiri (*decentralization it self* ) yang sering terjadi adalah ketika antara pusat dengan periferi itu ada konflik yang berkelanjutan. Dan desentralisasi dianggap sebagai solusi yang tidak menjawab, itu sering terjadi. Tetapi *existing condition* itu harus ada , kondisi awalnya. Yaitu konflik antara periferi dan center.

**HB**

Dan biasanya apa? konflik itu disebabkan oleh siapa & lokasi?

**AB**

Misalnya pusat dengan Papua, Aceh dan pusat. Jadi, ada komponen-komponen lokal yang menginginkan pemisahan. Tetapi desentralisasi itu sendiri memang lebih banyak justru mempertahankan teritori. Pada umumnya mempertahankan teritori

**HB**

Jadi lebih kuat dalam konteks serangan dari luar ? misalnya gitu ?

**AB**

Satu yang tadi anda bilang. Kedua nafsu untuk berpisah dari satu wilayah itu bisa berkurang karena arena politik lokal itu hidup.

**HB**

Artinya, untuk apa berpisah ? kita sendiri sudah ada, *resources* ada, diberikan kebebasan, otoritas dan sebagainya.

**AB**

Sehingga itu bisa menjawab, bahkan ada studi itu namanya Alicena mengenai desentralisasi dan perpecahan. Ternyata memang jika ada desentralisasi maka tendensi untuk pecah itu menurun..

**HB**

Wah, orang-orang harus tahu itu..

**AB**

Jadi sebenarnya itu menjawab, di kita kasusnya desentralisasinya di tingkat kabupaten bukan di tingkat provinsi (itu tema tersendiri yang berbeda) tetapi menjawab soal tadi. Apakah desentralisasi ini membahayakan integritas, teritori dsb. Sebenarnya tidak.

**HB**

Atau terbalik, menurut studi-studi malah terbalik.

**AB**

Malah itu memberikan arena terhadap aspirasi lokal untuk diartikulasikan. Yang menjadi problem dan tidak terjawab oleh desentralisasi. Itu adalah biasanya komponen *review sharing* dan *authority sharing*, ini yang sulit. Biasanya desentralisasi tidak menjawab ini.

**HB**

Apa itu artinya..?

**AB**

Misalnya di tempat-tempat yang mempunyai *resources* banyak akan tarik menarik soal berapa persen yang tinggal, berapa persen ke pusat. Itu *reinforcement* ini bisa berefek negative. Misalnya kalau *reinforcement*nya tidak sesuai, daerah merasa kurang memang desentralisasi itu. otoritas tingkat local bisa dijadikan instrument untuk menjadi kekuatan local dan memisahkan diri ke tempat-tempat yang mempunyai *revenue* yang besar, jadi ke tempat tidak sebenarnya non-isu, dan untuk kasus di Indonesia saya rasa kita harus lebih jeli memantau kemungkinan separasi.

**HB**

Artinya identifikasinya harus cermat dan satu-satu, tidak bisa secara gampang?

**AB**

Misalnya kalau kita lihat, ada empat propinsi kaya di Indonesia; Kalimantan timur, Aceh, Riau dan Papua. Dari empat ini yang paling alot itu dua.. Papua dan Aceh. Riau dulu tahun 1999 sempat memanfaatkan peluang reformasi untuk memunculkan isu Riau merdeka, Kaltim hampir tidak ada, pertanyaannya mengapa terjadi begitu ?

**HB**

Ok, pertanyaannya kita jawab setelah yang satu ini..

**Iklan**

**HB**

Halo..... selamat pagi lagi, saudara anda masih bersama Forum Freedom dan bersama saya Hamid Basyaib dan Anies Baswedan, tadi kita membicarakan soal empat wilayah kaya di indonesia yaitu; Kaltim, Riau, Aceh dan Papua. Dua diantaranya bergolak dan dua lainnya tidak. Riau sempat bergolak sedikit, tetapi Kaltim yang paling kaya justru tidak pernah bergolak sama sekali. Anies tadi sempat menjawab itu, sekarang kenapa itu Nies...?

**AB**

Semuanya memiliki SDA (sumber daya alam) yang luar biasa banyaknya.

**HB**

Kaltim yang terkaya kan..?

**AB**

Iya, tapi Irian juga. Tapi yang sudah di eksploitasi Kaltim. Tetapi kalau potensi barangkali Irian masih nomor satu. Aceh juga besar sekali. Dari empat ini kalau kita perhatikan komponen utamanya justru kohesifitas kultural masyarakat. Jadi di tempat-tempat yang masyarakat memiliki identitas kultural yang kuat kemungkinan mereka meng-*organized* diri di dalam sebuah sub-*nation* itu menjadi tinggi. Dalam konteks ini Aceh dan Irian itu dua sub *National* yang homogen punya identitas secara kultural, rasial, bahkan pernah menjadi agama Entitas yang kuat. Kaltim yang tidak? (Yang sepi betul) ini dominannya migran. Dari banjar, bugis, madura. Mereka yang di pasar, pemerintahan mereka yang menjalankan operasi kehidupan. Tentu saya tidak menyatakan masyarakat indi (pribumi) di Kaltim tidak dominan. Namun secara realtif mereka bukan *the only player*. Dibandingkan dengan di Aceh, Irian. Misalnya Riau sempat bergolak sedikit. Saya melihat itu. hanya Riau ini agak diuntungkan kendala geografis. Tingkat kohetifitasnya tidak sekuat di Aceh. Jadi itu salah satu penjelasan mengapa di satu wilayah terjadi keinginan untuk melepaskan diri. Padahal *Resourches* yang di ambil pusat kan sama ? apa itu Kaltim, Aceh, itu kan sama. Tapi hanya beberapa yang bisa muncul ke permukaan dan *organized* itu stabil penjelasannya begitu.

**HB**

Artinya apa? Artinya itu implisit merekomendasikan supaya daerah-daerah itu jangan terlalu homogen ?

**AB**

Bukan, sebenarnya begini. Intinya, kalau kemudian proses modernisasi ini bergerak terus, maka migrasi pertukaran penduduk itu akan semakin lancar, makin kuat, ketika itu terjadi. Maka potensi untuk menterjemahkan kepentingan lokal didalam bentuk tarik menarik dengan pusat itu menjadi rendah.

**HB**

Artinya, kalau proses desentralisasi berjalan lancar, maka arus migrasi, arus perpindahan, harus lancar (walaupun belum tentu juga) maka...?

**AB**

Ini fase *critical*, karena muncul isu putra daerah, dan ini agak kontra produktif, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat normal (menurut saya), jadi jangan dianggap sesuatu yang berbahaya sekali, mengapa ? karena dalam jangka pendek isu putra daerah itu akan muncul tetapi....

**HB**

Anda yakin itu jangka pendek ?

**AB**

Saya melihatnya begitu, dan itu dimana-mana. Artinya bukan Indonesia saja yang punya putra daerah itu. Apalagi kalau berbicara tentang kasus India. India ini sudah desentralisasi mulai tahun 60-an. Jauh 30 tahun sebelum kita. dan disana itu multi-etnik, dengan berbagai macam bahasa. Jadi itu bukan kita saja gitu yang paling *divers* ?

**HB**

Mereka memunculkan isu putra daerah juga ?

**AB**

Muncul, kebetulan disana itu kombinasi anara itu plus kasta. Lebih kompleks, dan itupun jangka pendek isu putra daerah. Sehingga dalam konteks kita juga (saya curiga ) itu isu jangka pendek. Begitu putra daerah tidak *perform* publik itu menginginkan pemerintah yang responsif. Pembangunan berjalan lancar, perekonomian berjalan baik. Daripada identitas etniti-entitas dari orang yang menjalankannya, dan ini saya rasa akan terbukti pelan-pelan. Satu persatu kasus. Dan melihat pengalaman negara lain *we are not the first* jadi bukanlah yang pertama.

**HB**

Ya, tentu ini akan memakan waktu ya. Anda akan banyak membuat orang jengkel karena banyak orang yang tidak sabar. Bagaimana anda bilang bahwa soal itu akan selesai, berapa tahun ? misalnya 15 tahun, anda bisa di demo orang, karena banyak orang yang tidak sabar, gimana ?

**AB**

Pertama begini, kita lihat desentralisasi secara umum, desentralisasi umum itu begitu datang ke daerah itu akan punya efek besar, satu muncul elit-elit yang dominan, kemudian muncul isu-isu yang selama ini tidak bisa..? misalnya isu putra daerah isu yang tidak bisa di artikulasikan secara bebas. Dulu isu-sisu seperti itu karena penunjukan dari pusat, dsb. Lalu muncul juga keinginan untuk melakukan pembangunan yang macam-macam. Jadi begitu desentralisasi dibuka, ada liberalisasi-liberalisasi otoritas di bidang politik, ekonomi, bidang administrasi. Memang mendadak ada euforia ini, tapi kita harus bayangkan ini itu bukan proses yang berjalan pelan-pelan, desentralisasi indonesia ini disebut oleh banyak orang sebagai *big bang policy*

**HB**

Mendadak ya... meledak

**AB**

Mendadak sekali dan segala macam...

**HB**

Ketidak siapan ...

**AB**

Jadi tentu saja akan ada respon yang begitu kuat. Berapa tahun? Tergantung daerah masing-masing. Di Bali barangkali respon ini lebih kuat dibandingkan di... misalnya kaltim

**HB**

Barangkali di Bali selamanya putra daerah

**AB**

Tapi itu contoh saja, bagaimana respon iu memang bervariasi, tetapi akan mencapai moderasi.

**HB**

Tetapi ini yang kasus terbaru kan. Menurut saya luar biasa ya misalnya di Papua. Dua itu ditolak, dua calon gubernur, dan wakil gubernur ditolak oleh MRP (Majelis Rakyat Papua). Kemudian kontroversi timbul

karena orang yang ditolak itu. lalu di persoalkan, karena orang ini ibunya papua.. gitu..

**AB**

Ya, ini putra daerah itu, satu isu yang politis bisa di pakai, tapi secara hukum itu berat sekali apa ?

**HB**

Ya ini masalahnya, ini agak luar biasa, menurut saya di papua, karena menyebut-nyebut juga soal ras, rasnya harus ras melanisia, ya ini memang agak luar biasa ya...

**AB**

Ini agak... saya melihat ini jangka pendek tetapi publik itu harus sensitif. Sensitif bahwa ini isu berbahaya, karena ini memunculkan isu ? ini berbahaya. Mengapa ? karena kita belum punya standar untuk bisa *fair* lintas etnis jadi sangat mungkin ..sebutlah di eksploitasi, isu-isu begini kalau isu-isu seperti ini di eksploitasi kalau berhadapan minoritas itu jadi berbahaya gitu. kalau berhadapan dengan mayoritas itu jadi lain. Misalnya, kalau di irian itu tidak mau orang ke jawa, itu lebih bisa di fahami, gitu. Karena terhadap.... tetapi kalau kemudian isunya muncul agama, atau etnis minoritas sub-etnis itu jadi berat.

**HB**

Artinya perang saudara, bisa-bisa ya...?

**AB**

Ya.... tidak sampai sejauh perang saudara barangkali hanya potensi membangun friksi itu akan kuat. Saya jadi teringat, ada penelitian mengenai itu. Kalau tidak salah James Menner, itu mengkaji etnis minoritas dan desentralisasi

**HB**

Di berbagi negara ?

**AB**

Di berbagi negara. Kasusnya sebetulnya Afrika dan Asia Selatan. Kesimpulannya memang desentralisasi ini memojokkan kaum minoritas ?

**HB**

Memojokkan kaum minoritas ?

**AB**

Memojokkan kaum minoritas di tingkat lokal, karena kalau di tingkat nasional pemerintah pusat justru lebih memperhatikan etnis minoritasnya, di banding lokal. Mengapa ? karena di tingkat lokal apa faedahnya ? misalnya orang di daerah banten, mikirin baduy, kalau orang banten sendiri misalnya ini, apa faedahnya ? orang ini voting tidak, pemilu gak nyoblos..

**HB**

Biarin aja dia begitu....

**AB**

Tetapi ketika nasional, ini ada perhatian tersendiri, ada insentif lain, saya tidak tahu benar atau tidaknya, ini contoh saja jadi orang-



orang minoritas cenderung tidak diuntungkan dengan desentralisasi. tingkat lokal yang elit tadi belum sempat kita dis kusikan nih.. elit ini, yang sering dikatakan bahwa desentralisasi itu ditunggangi, oleh...

HB

Demokrasi di bajak...

AB

Demokrasi dibajak yang harus kita pahami begini, begitu ada transformasi otoritas....

HB

Dari pemerintahan pusat ke daerah..

AB

Dari pemerintahan pusat ke daerah, pertanyaan pertama yang fundamental siapa yang paling siap menerima otoritas itu ?

HB

*the elit...*

AB

*The elit yang organized*, kalau Cuma elit dan gak *organized* itu gak akan terima juga, karena itu di banyak tempat ada kelompok adat, aristokrat lama, entah itu keraton, kesultanan yang cepat mereka menerima otoritas

HB

Itu yang anda maksud elit yang *organized* yang terorganisasi ?

AB

Ada yang *unorganized* ..

HB

Contohnya apa ?

AB

Contohnya kaum pengusaha..

HB

Mereka elit tetapi...

AB

Mereka elit tetapi *unorganized*

HB

Kalau mereka *organized* seperti kategori *bisnisman*, bisa masuk kategori *organized*.

AB

Nah, itu yang begitu terjadi desentralisasi, *organized* elit terima, pelan-pelan yang *unorganized* akan merespon lalu disini muncul dinamika baru, di tingkat lokal. Jadi ketika kita melihat lima tahun pertama di kuasai oleh elit-elit tertentu, korupsi besar, itu suatu yang...

HB

sangat alamiah...

**Ab**

Bukan alamiah, ya buat elit saja, karena ini *big bang*, lain kalau proses desentralisasi berjalan pelan-pelan selama sepuluh tahun lalu di akhir 10 thn kita melihat ternyata ...wah ini didominasi . nah bisa menjadi pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi ?

**HB**

kalau sekarang?

**AB**

Kalau sekarang serba kaget, tentu saja terjadi, apakah itu positif atau negatif, gini lah.. faktanya ini sudah terjadi . bahwa faktanya barangkali bahwa pemerintahan itu perkembangannya gak tepat, tapi itu sudah terjadi, saya sebetulnya optimis, bahwa elit-elit baru ini akan muncul dan elit-elit baru ini akan mengorganisasikan diri kemudian akan berkompetisi. Lalu apa pertanyaannya ? bagaimana publik ? lalu kan jadi elit ini ? sebenarnya kita cenderung melihat demokrasi dalam pandangan yang populistik

**HB**

Yang sebetulnya tidak pernah terjadi..

**AB**

Ya.. minim sekali..

**HB**

Dan itu hanya ada dalam slogan, pemerintah dari rakyat untuk rakyat..

**AB**

Minim sekali, sudah begitu, nah itu slogannya Abraham Lincoln bukan konsep demokrasi. Jadi kita terbawa itu , dalam kenyataannya demokrasi itu , apalagi di tingkat lokal lebih merupakan arena dimana berbagai kepentingan bisa bertarung. termasuk kepentingan elit. Jadi yang mengartikulasikan tentu saja elit-elit tetapi kepentingannya tidak hanya satu gitu, kepentingannya bisa *multiple*, nah *multiple* elit ini, elit yang banyak ini yang saya yakin akan tumbuh.

**HB**

Artinya mereka juga berkompetisi atau berkonflik ya.... tidak tunggal.... ya.....

**AB**

Nggak tunggal...

**HB**

Dengan demikian artinya apakah artinya demokrasi juga bisa punya ruang ya, justru karena ketidaktunggalan kaum elit itu.

**AB**

Ya, itulah prakteknya di banyak negara, di banyak negara itu kenapa demokrasi bisa *survive* sebetulnya bukan karena pandangan-pandangan yang apolitik, tetapi karena elit yang mau berkompetisi secara fair, ini yang membuat demokrasi jadi terkonsolidasi.

**HB**

Ok Nies, terima kasih banyak. Sayang waktunya tidak banyak kita lanjutkan lagi (mudah-mudahan) minggu depan, terima kasih atas

kehadiran anda. Nah saudara, begitulah akhir dari Forum Freedom kita pagi ini. Anda bisa berkomentar dengan mengirim sms ke 021-70497497. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.